



# LAPORAN SURVEI

INDEKS PRESEPSI ANTI KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II  
JULI - SEPTEMBER 2021



TAHUN  
2021



**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN**

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSIDI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
JULI – SEPTEMBER 2021**

Disahkan di Sarolangun

Oktober 2021



Top Manager

**DEKA DIANA, S.H, M.H**

**NIP. 19801208 200312 2 001**

Quality Management Representative

**RAYMON HARYANTO, S.H**  
**NIP. 19910502 201712 1 002**

Ketua Tim Survei,

**DEDET SYAHGITRA, SH.-**  
**NIP. 19831206 200912 1 004**

*Assamuaalaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi serta menuju Zona Integritas di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi yang berdasarkan Surat Dirjen Badilum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu ada masukan kritik dan saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survei dapat lebih baik sehingga berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, Juli 2021

Tim Survei

	<i>Halaman</i>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB. I    PEDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
<b>BAB. II    METODOLOGI</b>	
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	4
2.5. Teknik Analisis Data .....	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan .....	5
<b>BAB. III   Indeks Persepsi Anti Korupsi</b>	
3.1. Profil Responden .....	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja .....	15
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan .....	16
<b>BAB. IV    Penutup</b>	
4.1. Kesimpulan .....	18
4.2. Rekomendasi .....	18
<b>LAMPIRAN</b>	

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas .....	5
2.	Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi .....	6
3.	Nilai Persepsi .....	6
4.	Tingkat Pendidikan Responden .....	7
5.	Jenis Pekerjaan Responden .....	7
6.	Kelompok Usia Responden .....	8
7.	Kelompok Jenis Kelamin .....	9
8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	9
9.	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	10
10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	10
11.	Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya .....	11
12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan .....	12
13.	Indeks Pada Indikator Hadiah .....	12
14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya .....	13
15.	Indeks Pada Indikator Pencaloan .....	14
16.	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	14
17.	Indeks Pada Transaksi Rahasia .....	15
18.	Indeks Persepsi Korupsi Satua Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16
19.	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16
20.	Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sarolangun .....	16

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Grafik Tingkat Pendidikan Responden .....	7
2. Grafik Jenis Pekerjaan Responden .....	8
3. Grafik Kelompok Usia Reponden .....	8
4. Grafik Kelompok Jenis Kelamin .....	9
5. Graik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	9
6. Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	10
7. Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	11
8. Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya .....	11
9. Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan .....	12
10. Grafik Indeks Pada Indikator Hadian .....	13
11. Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya .....	13
12. Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan .....	14
13. Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	15
14. Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia .....	16

## 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## 1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Link dan Barcode Aplikasi Survey Si Survey
  - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Datapendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin,



pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

### 2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun). Wakil Ketua Pengadilan Sarolangun akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara

tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

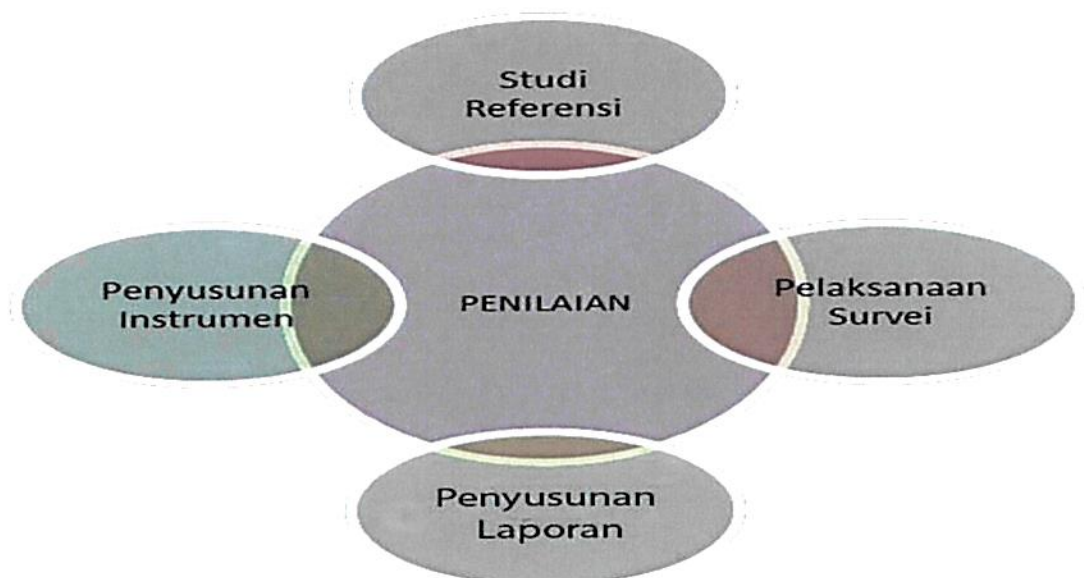
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### 3.1. PROFIL RESPONDEN

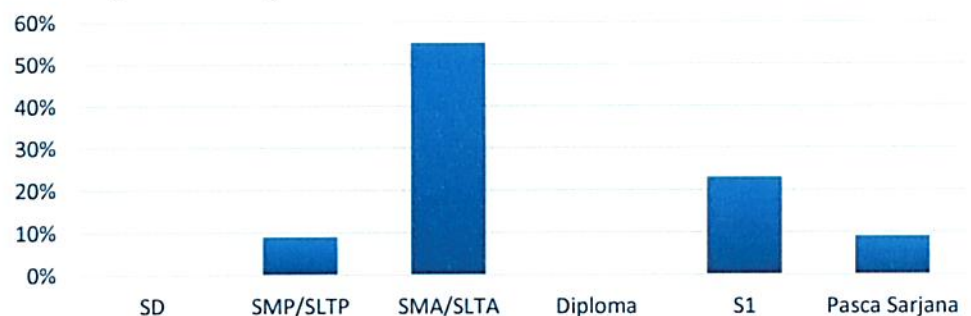
#### 3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden.

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA dengan persentase 55,00 %(lima puluh lima persen)

**Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden**

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD	0	0
2.	SMP/ SLTP	2	9
3.	SMA/ SLTA	12	55
4.	Diploma	0	0
5.	Sarjana	5	23
6.	Pasca Sarjana	2	9
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 1.**  
**Grafik Tingkat Pendidikan Responden**

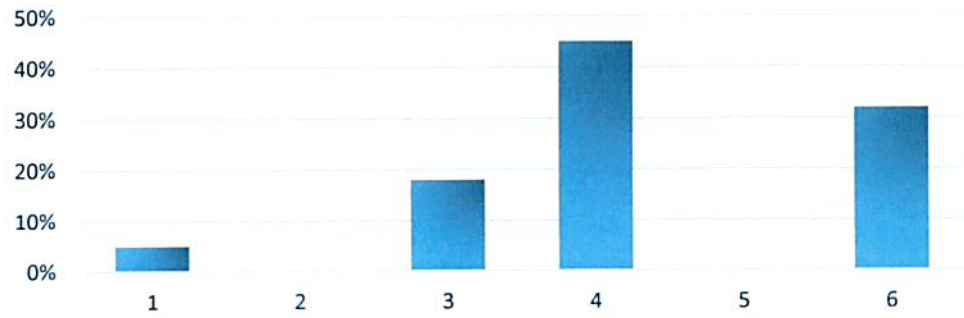
#### 3.1.2. Pekerjaan Responden.

Dari ruang lingkup jenis pekerjaan responden, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta sebesar 45 % (empat puluh lima) persen.

**Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden**

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	1	5
2.	TNI/ Polri	0	0
3.	Swasta	4	18
4.	Wiraswasta	10	45
5.	Tenaga Kontrak	0	0
6.	Lainya	7	32
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 2.**  
**Grafik Jenis Pekerjaan Responden**

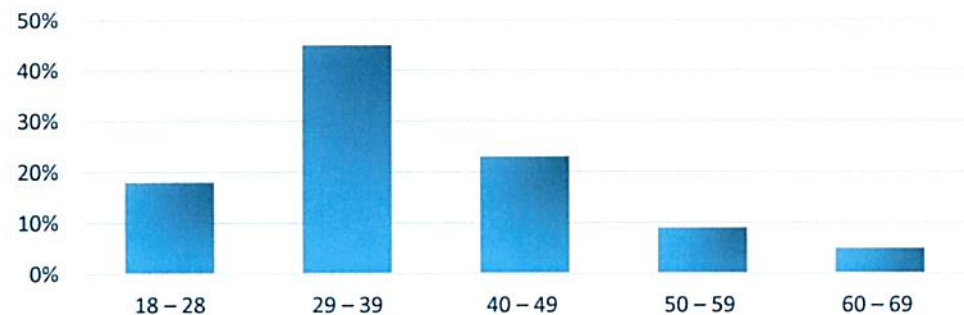
**3.1.3. Kelompok Usia Responden.**

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar Kelompok Usia Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas berumur antara 29 sampai dengan 39 tahun dengan persentase sebesar 45% (empat puluh lima) persen.

**Tabel 6. Kelompok Usia Responden**

No	Umur	Frekuensi	%
1.	18 – 28	4	18
2.	29 – 39	10	45
3.	40 – 49	5	23
4.	50 – 59	2	9
5.	60 – 69	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 3.**  
**Grafik Kelompok Usia Responder**

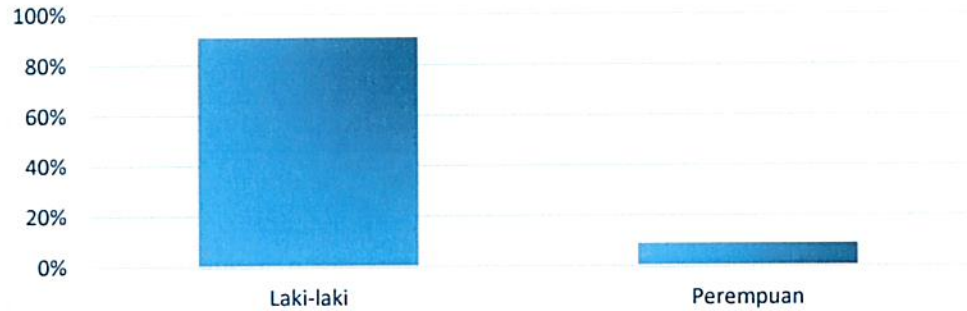
**3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin.**

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah laki-laki dengan persentase 91,00 %. (Sembilan puluh satu persen)

**Tabel 7. Kelompok Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	20	91
2.	Perempuan	2	9
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 4.**  
**Grafik Kelompok Jenis Kelamin**

### 3.2. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PERINDIKATOR

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan ini diperoleh rata-rata skor 3,86 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

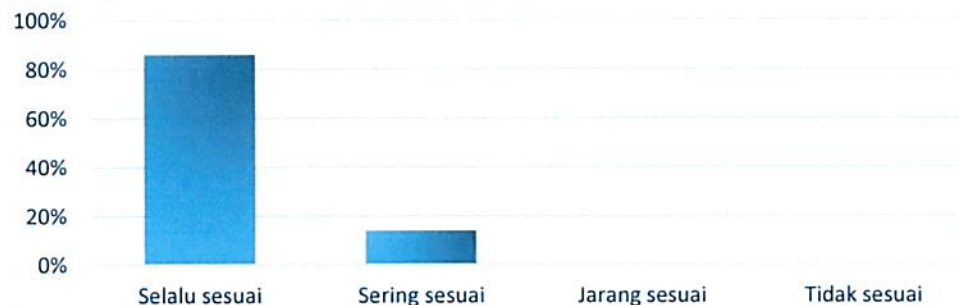
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Manipulasi Peraturan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8.Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	3	14	0,41
4.	Selalu sesuai	4	19	86	3,45
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,86</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 5.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan**

### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 3,81 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

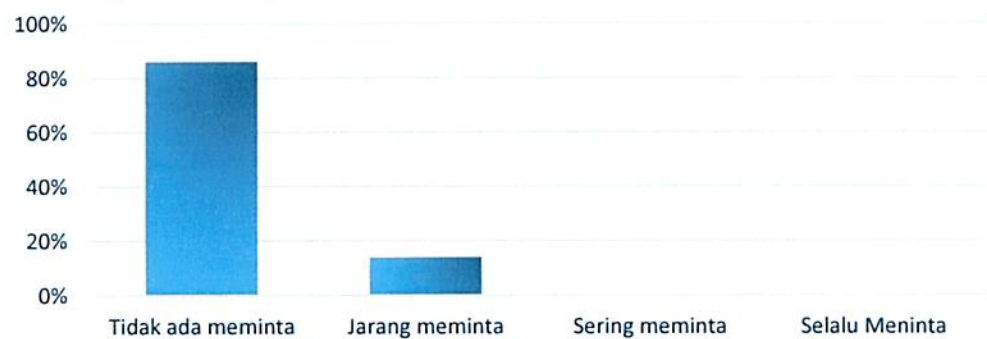
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 9. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu meminta	1	0	0	0,00
2.	Sering meminta	2	0	0	0,00
3.	Jarang meminta	3	4	18	0,55
4.	Tidak ada meminta	4	18	82	3,27
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,81</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 6.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Menjual Pengaruh ini diperoleh rata-rata skor 3,86 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Menjual Pengaruh di sajikan pada tabel berikut ini :



**Tabel 10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu dihubungi	1	0	0	0,00
2.	Sering dihubungi	2	0	0	0,00
3.	Jarang dihubungi	3	3	14	0,41
4.	Tidak ada dihubungi	4	19	86	3,45
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,86</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 7.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh**

### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,64 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

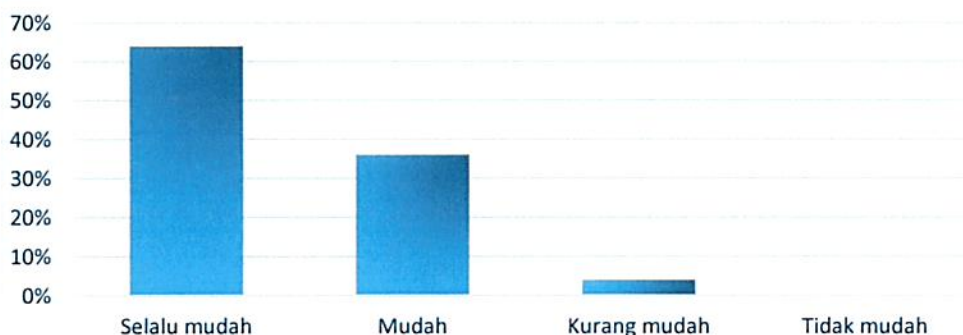
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak mudah	1	0	0	0,00
2.	Kurang mudah	2	0	0	0,00
3.	Mudah	3	8	36	1,09
4.	Selalu mudah	4	14	64	2,55
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,64</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 8.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya**

**3.2.5. Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 3,68 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Biaya Tambahan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Biaya Tambahan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 12. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	7	32	0,95
4.	Selalu sesuai	4	15	68	2,73
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,68</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 9.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**

**3.2.6. Indikator Hadiah**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Hadiah ini diperoleh rata-rata skor 3,72 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Hadiah dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Hadiah di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 13. Indeks Pada Indikator Hadiah**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu memberi	1	1	5	0,05
2.	Sering memberi	2	0	0	0,00
3.	Jarang memberi	3	3	14	0,41
4.	Tidak ada memberi	4	18	82	3,27
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,72</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 10.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah**

### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transparansi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,81 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transparansi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

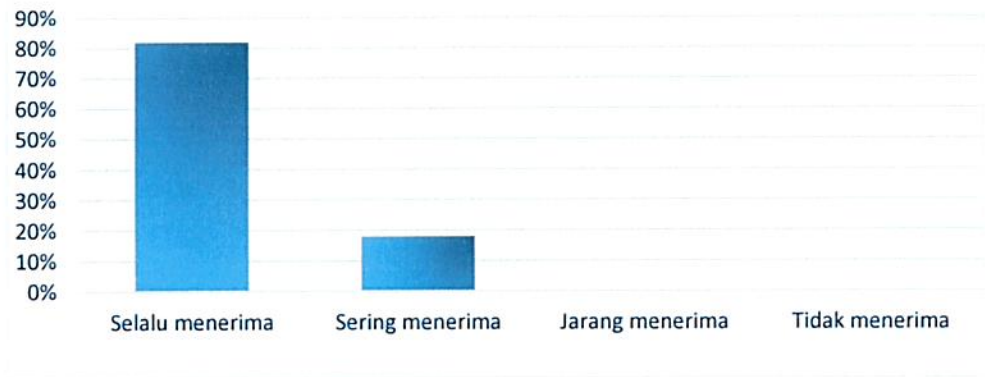
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transparansi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 14. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak menerima	1	0	0	0,00
2.	Jarang menerima	2	0	0	0,00
3.	Sering menerima	3	4	18	0,55
4.	Selalu menerima	4	18	82	3,27
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,81</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 11.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya**

### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Percaloan ini diperoleh rata-rata skor 3,95 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Percaloan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Percaloan di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 15.Indeks Pada Indikator Percaloan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu Mengetahui	1	0	0	0,00
2.	Sering mengetahui	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengetahui	3	1	5	0,14
4.	Tidak mengetahui	4	21	95	3,82
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,95</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 12.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan**

### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Perbuatan Curang ini diperoleh rata-rata skor 3,95 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan

Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Perbuatan Curang dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

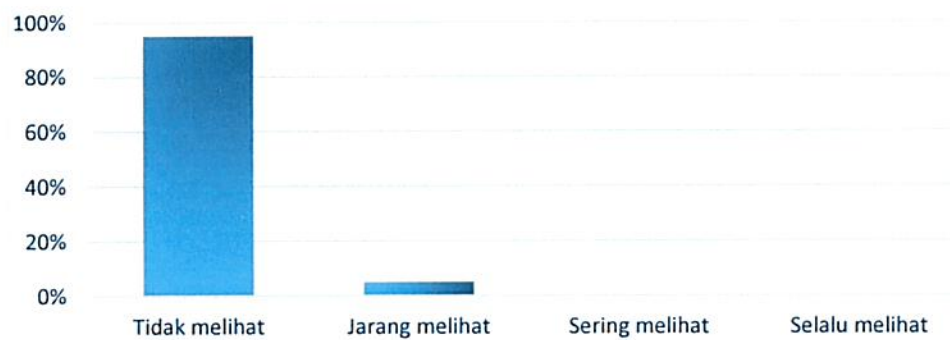
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Perbuatan Curang di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 16. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu melihat	1	0	0	0,00
2.	Sering melihat	2	0	0	0,00
3.	Jarang melihat	3	1	5	0,14
4.	Tidak melihat	4	21	95	3,82
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,95</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 13.**  
**Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Rahasia ini diperoleh rata-rata skor 3,86 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Rahasia dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Rahasia di sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 17. Indeks Pada Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu mengurus	1	0	0	0,00
2.	Sering mengurus	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengurus	3	3	14	0,41
4.	Tidak pernah mengurus	4	19	86	3,45
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>100</b>	<b>3,86</b>

\*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 14.**  
Grafik Indeks Pada Transaksi Rahasia

### 3.3. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 3,82.

**Tabel 18.**  
Indeks Persepsi Korupsi  
Satuan Kerjapada Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3,86	0,38	96,5
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,81	0,38	95,25
3.	Menjual Pengaruh	3,86	0,38	96,5
4.	Transaksi Biaya	3,63	0,36	90,75
5.	Biaya Tambahan	3,68	0,36	92
6.	Hadiah	3,72	0,37	93
7.	Transparansi Pembayaran	3,81	0,38	95,25
8.	Percaloan	3,95	0,39	98,75
9.	Perbuatan Curang	3,95	0,39	98,75
10.	Transaksi Rahasia	3,86	0,38	96,5
<b>NILAI</b>			<b>3,82</b>	<b>95,45</b>

Indeks 3,72 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 95,45 ;

**Tabel 19.**  
Persepsi Korupsi Satuan Kerja  
pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

### 3.4. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SATUAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama jadwal sidang lebih tepat waktu dan tidak membeda-bedakan
2	Transparan dan terbuka terhadap masyarakat
3	Peningkatan fasilitas Umum seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tunggu Advokat, Toilet, dan Kantin

**4.1. KESIMPULAN.**

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,82** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI** ;

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3,86	0,38	96,5
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,81	0,38	95,25
3.	Menjual Pengaruh	3,86	0,38	96,5
4.	Transaksi Biaya	3,63	0,36	90,75
5.	Biaya Tambahan	3,68	0,36	92
6.	Hadiah	3,72	0,37	93
7.	Transparansi Pembayaran	3,81	0,38	95,25
8.	Percaloan	3,95	0,39	98,75
9.	Perbuatan Curang	3,95	0,39	98,75
10.	Transaksi Rahasia	3,86	0,38	96,5
<b>NILAI</b>		<b>3,82</b>		<b>95,45</b>

**4.2. REKOMENDASI.**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021 tersebut diatas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai tertinggi yakni Perbuatan Curang, Percaloan dan Manipulasi peraturan memiliki indeks paling tinggi diantara indikator lainnya, namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yakni Transaksi Biaya, Biaya Tambahan dan Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki indeks yang tinggi.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
**Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201**



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
 Periode 1 Juli 2021 sampai 30 September 2021

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

**NILAI INDEKS**

**3,82 / 95,45%**

Jumlah	22 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 20	
	PEREMPUAN : 2	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	Diploma 2	: 0
	SD : 0	Diploma 3 : 1
	SMP : 2	S1 : 5
	SMU : 12	S2 : 2
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 4
	TNI : 0	WIRUSAHA : 10
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 7	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
3. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

Jakarta, 4 Oktober 2021  
 Direktur Jenderal Badan  
 Peradilan Umum

PRIM HARYADI

DATA RESPONDEN  
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Aryunani	JAMBI	20 Tahun	SMUSWASTA	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	29 September 2021
2	Alvin Januarsa	JAMBI	26 Tahun	SMUWIRUSAHA	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	28 September 2021
3	Endro Suseno	JAMBI	30 Tahun	SMUWIRUSAHA	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	22 September 2021
4	Al Muttakin	JAMBI	39 Tahun	SMPSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 September 2021
5	M. Riyadi	JAMBI	21 Tahun	SMUSWASTA	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	22 September 2021
6	Suwendi	JAMBI	44 Tahun	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 September 2021
7	Maskun	JAMBI	34 Tahun	SMUWIRUSAHA	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	14 September 2021
8	Samsul Riduan	JAMBI	45 Tahun	S1WIRUSAHA	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	14 September 2021
9	Zuhri A	JAMBI	36 Tahun	S1WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 September 2021
10	Feri Hamzah	JAMBI	30 Tahun	Diploma 3WIRUSAHA	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	14 September 2021
11	M Yani	JAMBI	37 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	14 September 2021
12	M Tarmizi	JAMBI	49 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 September 2021
13	Zuhri	JAMBI	30 Tahun	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 September 2021
14	Hayatuddin	JAMBI	32 Tahun	S1WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 September 2021
15	Karunia Kinantar Maulana	JAMBI	33 Tahun	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Agustus 2021
16	Ancolim	JAMBI	56 Tahun	S2LAINNYA	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	26 Agustus 2021
17	H Ali Munir	JAMBI	56 Tahun	S1SWASTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	26 Agustus 2021
18	SARIP ASURA	JAMBI	21 Tahun	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	25 Agustus 2021
19	Teti Suryanti	JAMBI	43 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	24 Agustus 2021
20	A. Somad	JAMBI	45 Tahun	SMPLAINNYA	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	10 Agustus 2021
21	Umar Muda Pasaribu SH	JAMBI	65 Tahun	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5 Agustus 2021
22	Samsur Rizal	JAMBI	35 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	28 Juli 2021



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**  
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun  
Telp/ Fax : 0745 – 91006  
Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

**MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI  
PERSEPSI ANTI KORUPSI  
JULI - SEPTEMBER 2021**

**I. MONITORING**

Dari hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3,86	0,38	96,5
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,81	0,38	95,25
3.	Menjual Pengaruh	3,86	0,38	96,5
4.	Transaksi Biaya	3,63	0,36	90,75
5.	Biaya Tambahan	3,68	0,36	92
6.	Hadiah	3,72	0,37	93
7.	Transparansi Pembayaran	3,81	0,38	95,25
8.	Percaloan	3,95	0,39	98,75
9.	Perbuatan Curang	3,95	0,39	98,75
10.	Transaksi Rahasia	3,86	0,38	96,5
<b>NILAI</b>			<b>3,82</b>	<b>95,45</b>

**II. EVALUASI**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,82** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi** ;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Juli s,d September 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi yakni :

1. Percaloan, dengan nilai indeks rata-rata 3,95 ;
2. Perbuatan Curang, dengan nilai indeks rata-rata 3,95 ;
3. Manipulasi Peraturan dengan nilai indeks rata-rata 3,86 ;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni :

1. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,63 ;
2. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 3,68 ;
3. Hadiah, dengan nilai indeks rata-rata 3,72 ;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

### III. TINDAK LANJUT

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan III tahun 2021, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Transaksi Biaya, Hadiah, dan Transparansi Pembayaran Tindak lanjut dari ketiga Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan dan pelatihan sebagai berikut :

#### III.1. Transaksi Biaya;

Secara umum pengertian dari transaksi biaya dapat diartikan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu lembaga atau badan usaha.

Dalam survei persepsi korupsi ini, adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk indikator Transaksi Biaya adalah “*Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan ?*” ;

Tindak lanjut untuk peningkatan dan pembenahan ruang lingkup Transaksi Biaya, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

No.	URAIAN	TARIF	SATUAN	YANG DIBAYARKAN
1	SFRD NO 8/SK/HK/02/2021/PN. SRL AN: PAHARI	10.000	1	10.000 S
JUMLAH				Rp. 10.000

Sarolangun, 11-02-2021  
Pahari

Lembar - Putih - Kopianteraan Hukum  
- Merah - Penyetor  
- Kuning - Kasir

Penyediaan tanda terima PNBP



### Penyediaan informasi tarif / biaya melalui website

#### III. 2 Biaya Tambahan ;

Yang dimaksud dengan Biaya Tambahan dalam hal ini adalah harga yang harus dibayarkan diluar dari biaya yang sebenarnya;

Dalam survei persepsi korupsi ini, adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk indikator Transparansi Pembayaran adalah *“Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?”*

Tindak lanjut untuk peningkatan dan pembenahan ruang Biaya tambahan, telah dilakukan adalah pemasangan stand banner tarif / biaya agar tidak ada pengguna layanan yang membayar biaya diluar itu:



#### III . 3. Hadiah ;


Yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian rasa terima kasih berupa barang ataupun dalam bentuk lainya dari pengguna layanan atas layanan yang diterima ;

Dalam survei persepsi korupsi ini, adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk indikator Hadiah adalah “Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?” ;

Tindak lanjut untuk peningkatan dan pembenahan ruang lingkup Hadiah, telah dilakukan kegiatan penempelan poster dilarang melakukan suap dan gratifikasi serta pemberitahuan harap melapor jika ada petugas yang meminta ibalan, berikut buktinya :



Mengetahui,  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

  
Deka Diana, S.H, M.H  
NIP.198012082003122001

Sarolangun, 13 Oktober 2021  
Panitera Muda Hukum

  
Dedet Syahjitra, S.H  
NIP. 198312062009121004